

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan usaha yang meliputi perubahan pada berbagai aspek termasuk di dalamnya struktur sosial, sikap masyarakat, serta institusi nasional dan mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang baik. Menurut Martono (2008), proses pembangunan secara filosofis dapat diartikan sebagai upaya sistematis dan berkesinambungan. Proses ini bertujuan menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif untuk pencapaian aspirasi warga. Pembangunan juga dapat diartikan sebagai proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya. Pembangunan ekonomi juga merupakan usaha menambah modal atau pengetahuan agar satu sama lainnya membawa pendapatan per kapita yang lebih besar.

Menurut Arsyad (2009), usaha-usaha pembangunan banyak dilakukan di berbagai Negara, namun dalam kenyataannya banyak terjadi kegagalan dalam memecahkan masalah-masalah pembangunan. Kegagalan tersebut memberikan dorongan bagi ekonom untuk mencari solusi permasalahan tersebut. Sejak itu, maka aspek-aspek yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi telah menjadi perhatian bagi ekonom, baik pembangunan ekonomi daerah maupun pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pembangunan daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan

membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru serta mendorong pembangunan ekonomi nasional maupun daerah tersebut.

Pembangunan nasional terbagi dalam dua sektor, yaitu pembangunan sektor perekonomian dan sektor non perekonomian. Pada sektor perekonomian terbagi menjadi sembilan sektor, yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan galian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, sektor persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa. Pada sektor non perekonomian terbagi menjadi sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor budaya dan sektor politik yang dapat pula menyumbang pembangunan perekonomian negara. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang nyata dalam pembentukan PDB Nasional.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah memberikan wewenang yang lebih luas bagi tiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri yang kemudian akan mendorong daerah menjadi lebih mandiri. Undang-undang tersebut diharapkan dapat mengembangkan potensi dan keunggulan lokal daerah masing-masing, khususnya dalam rangka membangun sistem perekonomian daerah yang baik dan mandiri.

Berdasarkan konteks perekonomian pembangunan daerah, pertanian merupakan salah satu sektor penyusun PDRB Provinsi Sumatera Barat. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat menduduki urutan pertama dibandingkan sektor lain. Hal ini dapat terlihat di tabel berikut:

Tabel 1.1. Kontribusi Sektoral terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat (%)

Sektor	Thn.2009	2010	2011	2012	2013
Pertanian	24,49	23,95	23,84	23,84	23,01
Pertambangan	3,32	3,33	3,17	3,17	2,90
Industri	12,12	12,09	11,69	11,69	11,15
Listrik,Air Minum	1,22	1,17	1,06	1,06	0,95
Konstruksi	5,56	5,63	6,30	6,30	6,68
Perdagangan,Hotel,Resto	17,66	17,84	17,74	17,74	18,45
Angkutan, Komunikasi, Transportasi	15,06	15,21	15,41	15,41	15,89
Bank dan Lembaga Keu	4,88	4,93	4,75	4,75	4,52
Jasa-Jasa	15,69	15,86	16,03	16,03	16,45
TOTAL	100	100	100	100	100

Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka (2014)

Secara tradisional peranan pertanian dalam pembangunan ekonomi hanya dipandang pasif dan sebagai unsur penunjang semata. Peran utama pertanian hanya dianggap sebagai sumber tenaga kerja dan bahan-bahan pangan yang murah demi berkembangnya sektor industri yang dinobatkan sebagai “sektor unggulan” dinamis dalam strategi pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Perlahan mulai disadari bahwa daerah pedesaan pada umumnya dan sektor pertanian pada khususnya ternyata tidak bersifat pasif, tetapi jauh lebih penting dari sekedar penunjang ekonomi secara keseluruhan (Todaro dan Smith, 2003). Sektor pertanian berperan sebagai penyokong bahan baku sektor industri. Jika mampu dikembangkan lebih lanjut produksi sektor pertanian dapat mencapai jumlah maksimal, juga dapat menghasilkan barang konsumsi lain yang bernilai lebih dibanding hanya sebagai penunjang sektor lainnya.

Sumbangan sektor pertanian bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia selalu menduduki posisi yang sangat vital. Pemilihan sektor pertanian

sebagai andalan pembangunan nasional setidaknya didukung lima alasan. Pertama, sebagian besar penduduk Indonesia masih hidup di sektor pertanian atau menggantungkan kehidupannya dari kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki kaitan dengan sektor pertanian. Kedua, Indonesia masih menghadapi masalah pangan, baik untuk masa sekarang maupun masa mendatang. Seringkali komoditas pangan juga memiliki nilai strategis sebagai komoditas politik. Ketiga, Indonesia tidak mungkin dapat mengejar ketinggalannya untuk bersaing dengan negara-negara maju untuk menghasilkan produk-produk industri di pasar internasional, karena (a) keterbatasan modal untuk melakukan penelitian dan pengembangan, peningkatan mutu dan produktivitas sumberdaya manusia, serta untuk melakukan investasi dan rehabilitasi dari peralatan yang digunakan; (b) ketidakmampuan poin (a) mengakibatkan tidak mampunya untuk bersaing di pasar internasional, baik karena ketidakefisienan kegiatan maupun produk yang dihasilkan; (c) diberlakukannya politik proteksionisme oleh negara-negara maju, baik melalui penerapan kebijakan tarif dan bea masuk, pembatasan jumlah kuota serta kerjasama antar negara maju. Keempat, ketegaran sektor pertanian dalam menghadapi gejolak perekonomian dunia dibandingkan dengan sektor lainnya. Kelima, besarnya sumbangan sektor pertanian bagi pengembangan sektor industri (penyedia bahan baku, penyedia tenaga kerja murah, penyedia modal maupun konsumen produknya) terutama di awal pembangunan sektor industri (Kartasasmita, 1996).

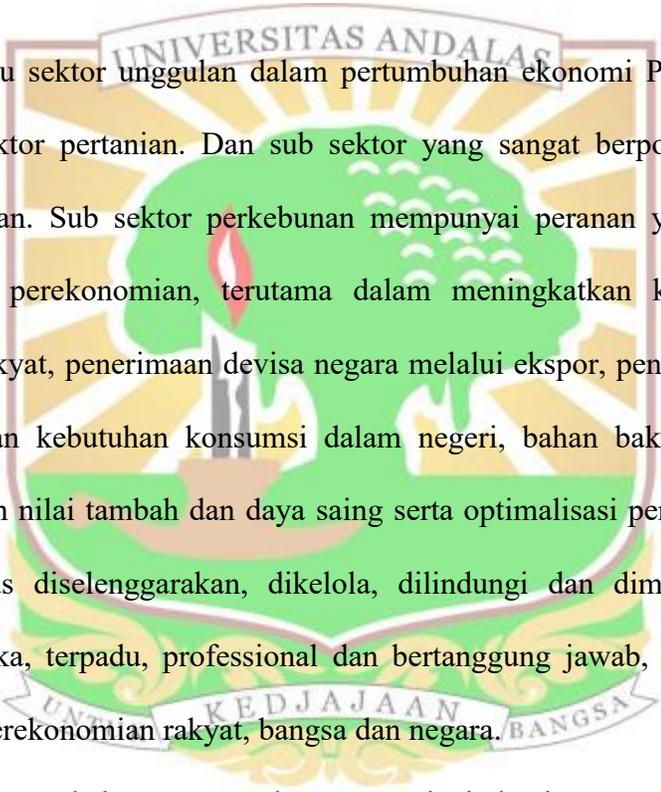
Indonesia sendiri dikenal sebagai negara agraris yang mengandalkan sektor pertanian dalam menopang pembangunan juga sebagai sumber mata pencaharian

masyarakatnya. Sektor pertanian sendiri sebagai penyedia pangan bagi sebagian besar penduduk di negara berkembang termasuk Indonesia, juga sebagai lapangan kerja yang tersedia secara luas bagi hampir seluruh angkatan kerja. Sektor pertanian juga sebagai penyedia bahan baku bagi sektor industri yang kini sedang berkembang pesat dan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan PDRB, sehingga sektor ini dianggap sangat dominan peranannya bagi perekonomian Indonesia.

Kriteria keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat diikuti dengan menggunakan berbagai macam metode, dan yang paling umum serta paling banyak digunakan adalah dengan menganalisis struktur dan perkembangan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) suatu daerah dari tahun ke tahun secara time series. Analisis secara keseluruhan akan mengetahui sektor basis perekonomian masa lalu dan kemudian dapat dipergunakan sebagai bahan atau dasar pertimbangan dalam membuat perencanaan pembangunan secara makro yang lebih baik dimasa yang akan datang (Syafrizal, 1997).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah/ wilayah dalam suatu periode tertentu. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi dalam suatu daerah/wilayah. Secara kuantitatif PDRB merupakan nilai barang dan jasa, oleh karena itu PDRB dihitung atas harga berlaku (*at current price*) dan PDRB atas dasar harga konstan (*at constant price*). Dengan kata lain, data PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah/

wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Oleh karena itu, nilai PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah/wilayah sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia dan teknologi (faktor produksi) di daerah/ wilayah tersebut. Kondisi terbatasnya sumberdaya alam dan penyediaan faktor-faktor produksi tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah/wilayah.



Salah satu sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat adalah sektor pertanian. Dan sub sektor yang sangat berpotensi adalah sub sektor perkebunan. Sub sektor perkebunan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam perekonomian, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara melalui ekspor, penyediaan lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri, perolehan nilai tambah dan daya saing serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam harus diselenggarakan, dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara terencana, terbuka, terpadu, professional dan bertanggung jawab, sehingga mampu meningkatkan perekonomian rakyat, bangsa dan negara.

Sub sektor perkebunan mencakup semua jenis kegiatan tanaman perkebunan yang diusahakan baik oleh rakyat maupun perusahaan perkebunan. Komoditi yang dicakup antara lain: kakao, cengkeh, karet, tebu, kelapa dalam, kelapa sawit, kopi, tembakau, the, jahe, jambu mete, jarak, kapas, kapok, cassiavera, kemiri, kina, lada, pala, vanili, nilam, tanaman serat (Badan Pusat Statistik, 2011).

TABEL 1.2
LUAS LAHAN PERKEBUNAN PER KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA
BARAT TAHUN 2013

No	KABUPATEN/KOTA	LUAS LAHAN PERKEBUNAN (Ha)
	KABUPATEN	
1	Kepulauan Mentawai	121.774
2	Pesisir Selatan	114.279
3	Solok	29.794
4	Sijunjung	62.058
5	Tanah Datar	32.685
6	Padang Pariaman	47.561
7	Agam	65.026
8	Lima Puluh Kota	60.177
9	Pasaman	56.654
10	Solok Selatan	50.559
11	Dharmasraya	154.316
12	Pasaman Barat	168.601
	KOTA	
1	Padang	8.069
2	Solok	1.951
3	Sawahlunto	2.103
4	Padang Panjang	264
5	Bukittinggi	489
6	Payakumbuh	1.137
7	Pariaman	1.528
	JUMLAH	979.025

Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka 2014 (Data diolah)

Provinsi Sumatera Barat memiliki luas lahan perkebunan sekitar 979.025 Ha. Terdiri dari Perkebunan Rakyat, Perkebunan Besar Swasta Nasional dan PTP milik pemerintah. Kabupaten yang memiliki kawasan terbesar untuk lahan perkebunan

adalah Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Pesisir Selatan. Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat kaya, berbagai hasil pertanian yang ada pun sangat menopang pertumbuhan ekonomi yang ada.

Upaya pembangunan ekonomi pada sub-sektor perkebunan di Provinsi Sumatera Barat dimaksud untuk meningkatkan pendapatan petani dan pemerataan pembangunan pedesaan karena luas wilayah yang ada sebagian dimanfaatkan untuk produksi sub-sektor perkebunan. Pembangunan sub-sektor perkebunan harus dapat mendukung pembangunan sektor lain. Jadi antara sub-sektor perkebunan dengan sub-sektor lainnya saling keterkaitan, bila hal ini terjadi maka akan sangat bermanfaat bagi tumbuhnya perekonomian di Provinsi Sumatera Barat. Dengan terus bertambahnya produksi sub-sektor perkebunan, sehingga menyebabkan pemasaran ke luar daerah sebagai sumber pendapatan wilayah selanjutnya. Jika sub-sektor ini berkembang maka Output yang ditawarkan meningkat dan dapat menggerakkan sektor-sektor yang menggunakan input yang berasal dari sub-sektor perkebunan. Jika dianalisis melalui analisis ekonomi basis maka sub-sektor perkebunan tergolong sektor basis baik ditinjau dari segi pendapatan maupun dari segi tenaga kerja, sehingga dampak pengembangan diharapkan pendapatan dan tenaga kerja dapat menunjang pembangunan wilayah.

Pembangunan perkebunan ditujukan untuk meningkatkan produksi dan memperbaiki mutu hasil, meningkatkan pendapatan, memperbesar nilai ekspor,

mendukung industri, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja, serta pemerataan pembangunan di semua wilayah. Ada tiga asas yang menjadi acuan dalam pembangunan perkebunan yang mendasari kebijakan pembangunan dalam lingkungan ekonomi dan pembangunan nasional. Ketiga asas tersebut antara lain adalah : (1) Mempertahankan dan meningkatkan sumbangan bidang perkebunan bagi pendapatan Nasional, (2) Memperluas lapangan kerja, (3) Memelihara kekayaan dan kelestarian alam dan meningkatkan kesuburan sumber daya alam.

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat dapat mengalami peningkatan, dengan adanya bantuan oleh komoditas lainnya. Saat ini pertumbuhannya terus meningkat, seperti sub sektor perkebunan, diperkirakan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat di tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Hal ini tentu saja didukung oleh faktor-faktor, salah satunya adalah kemajuan teknologi yang membantu masyarakat dalam pengetahuan dan informasi yang dapat mendorong adanya lahan bisnis dikalangan masyarakat.

Dampak perubahan lingkungan strategis terhadap subsektor perkebunan tentu perlu dicermati ataupun dianalisis. Dengan analisis tersebut, berbagai pihak yang terlibat dalam agribisnis perkebunan, seperti produsen/petani, pedagang, dan pemerintah, dapat mengambil langkah-langkah antisipatif guna mengembangkan subsektor perkebunan secara optimal. Dengan demikian alokasi sumberdaya pada subsektor perkebunan dapat berjalan secara efisien, sehingga pada akhirnya kesejahteraan masyarakat perkebunan dapat dicapai secara optimal. (Suhadi , 2001)

menunjukkan bahwa secara keseluruhan tujuan dari suatu pertumbuhan harus konsisten dengan aspirasi dari sebagian besar masyarakat, dalam arti menaikkan kemakmuran, distribusi pendapatan dan kualitas hidupnya, dengan sumber-sumber yang tersedia.

Untuk lebih mengoptimalkan penggunaan sumber daya perkebunan maka produktivitas tiap komoditinya perlu diukur untuk melihat potensi komoditi mana yang lebih bagus untuk dikembangkan dalam mendukung kinerja sub sektor perkebunan. Produktivitas komoditi sendiri dapat diukur dengan membandingkan jumlah produksi dengan luas lahan yang tersedia.

Oleh karena itu, Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat maupun Dinas Perkebunan yang ada di 19 Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat mempunyai peranan penting dalam pembangunan sub sektor perkebunan yang akan memberikan kontribusi terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat. Maka dari itu penulis yang kebetulan bekerja di Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat tertarik ingin meneliti tentang Analisis Kinerja Sub Sektor Perkebunan di Provinsi Sumatera Barat.

1.2 Perumusan Masalah

Penelitian ini berfokus untuk menjawab pertanyaan :

1. Bagaimana kontribusi/ kinerja sub sektor perkebunan per Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat.
2. Apakah sub sektor perkebunan menjadi sektor basis dalam perekonomian di 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat .

3. Bagaimana produktivitas komoditi unggulan yang terdapat di seluruh 19 Kabupaten/Kota.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kontribusi/ kinerja sub sektor perkebunan per Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui apakah sub sektor perkebunan menjadi sektor basis dalam perekonomian di 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat .
3. Untuk mengetahui produktivitas komoditi unggulan yang terdapat di 19 Kabupaten/ Kota.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan mengenai peranan sub sektor perkebunan terhadap pembangunan Provinsi Sumatera Barat dimana penulis bekerja di sektor tersebut untuk menjadi pengalaman serta pelajaran yang berguna bagi pekerjaan penulis serta merupakan salah satu syarat untuk memperoleh derajat S2 pada Program Magister di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

2. Bagi instansi/ pemerintah daerah

Sebagai masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat khususnya Dinas Perkebunan Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja sub sektor perkebunan setiap tahunnya.

3. Bagi pembaca

Menambah wawasan dan pengetahuan penelitian dalam akuntansi sektor publik melalui pengembangan akuntansi pemerintahan untuk diteruskan dalam penelitian yang relevan.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk lebih terarahnya fokus penelitian ini maka perlu adanya pembatasan masalah dari beberapa hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini adalah berupa penelitian deskriptif kuantitatif untuk mengetahui peranan sub sektor perkebunan dan kontribusinya terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat
2. Data yang digunakan adalah PDRB Provinsi Sumatera Barat, Data PDRB 19 Kabupaten/Kota Sumatera Barat Tahun 2009-2013, Data Distribusi PDRB masing-masing sektor, Data Statistik Perkebunan yang mencakup Luas Lahan Perkebunan, Produksi Tanaman Perkebunan.